

Lampung Post

Tribun Lampung

Halaman

Radar Lampung

4

Tanggal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Bulan	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	2021
					<input checked="" type="checkbox"/>								

Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Baru 30%

Pemprov meminta OPD serius melakukan pengadaan barang dan jasa melalui Sibela untuk mencegah korupsi.

TRIYADI ISWORO

PEMERINTAH Provinsi Lampung baru melakukan pengadaan barang dan jasa sebesar Rp2,3 triliun atau 30% dari potensi Rp7,480 triliun APBD 2021.

Perincian dari 30% itu, yakni 19% atau Rp1,4 triliun untuk pengadaan belanja barang dan jasa serta 11% atau Rp828 miliar untuk belanja modal.

Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Provinsi Lampung, Slamet Riadi mengatakan berdasar pada Sistem Rencana Umum Pengadaan (Sirup) per 18 Mei 2021, terdapat 3.261 paket dari tender, pengadaan langsung, dan belanja langsung dengan nilai pagu Rp1.019 triliun.

Kemudian, untuk progres tender per 24 Mei 2021 ada 132 total paket yang terdiri dari 122 paket APBD dengan nilai Rp221,88 miliar, dari tujuh paket APBN sebesar Rp5,27 miliar.

Selanjutnya tiga paket Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), tiga paket dengan nilai Rp19,24 miliar, dari pekerjaan konstruksi ada 41 paket dengan nilai Rp166,15 miliar. Ke-

mudian untuk nilai harga perkiraan sendiri (HPS) Rp242,27 miliar.

"Sebanyak 56 paket yang selesai dengan nilai kontrak Rp208,39 miliar," ujarnya, Rabu (26/5).

Selanjutnya, untuk progres pengadaan langsung menggunakan Sistem Pengadaan secara Elektronik (SPSE) jumlah paket ada 146 paket dengan nilai Rp13,997 miliar. Kemudian, untuk jumlah usaha mikro kecil menengah (UMKM) ada 110.359 unit.

"SPSE Versi 4.4 diaplikasikan guna mendukung Sistem Belanja Langsung (Sibela)," katanya.

Terhitung sampai 24 Mei 2021 baru terpakai 30% atau Rp2,311 triliun dengan perincian 19% atau Rp1,482 triliun untuk pengadaan belanja barang dan jasa serta 11% atau Rp828,811 miliar untuk belanja modal.

"Kami terus mendorong percepatan pengadaan barang dan jasa. Kami meminta organisasi perangkat daerah (OPD) segera mengisi dan melengkapi rencana umum pengadaan dalam Sirup dan mempercepat proses pengadaan lewat SPSE dan Sibela," katanya, Rabu, 26 Mei 2021.

Kesadaran OPD

Ia mengatakan ada beberapa kendala yang dihadapi Provinsi Lampung, di antaranya kesadaran OPD untuk mengimplementasikan

belanja langsung pengadaan masih kurang.

Padahal, Gubernur telah mendorong seluruh pejabat OPD melakukan percepatan melalui Surat Sekretaris Provinsi Lampung kepada kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Nomor 555/1446/05/2021 tanggal 13 April 2021 perihal Tindak Lanjut Revisi SPSE versi 4.4 pada LPSE Provinsi Lampung.

"Maka percepatan-percepatan harus dilakukan. Seluruh OPD merencanakan dan membelanjakan 40% dana APBD kepada produk UMKM. Kemudian segera mengisi dan melengkapi rencana umum pengadaan serta melakukan proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan," katanya.

Sebelumnya, Asisten Administrasi Umum, Minhairin telah melakukan rapat koordinasi perluasan pemanfaatan Bela Pengadaan untuk pencegahan korupsi pengadaan bersama KPK RI dan para gubernur seluruh Indonesia pada Jumat (7/5).

Dalam agenda itu dibahas program untuk mendukung UMK Go Digital melalui proses belanja langsung K/L/PD yang bernilai paling tinggi Rp50 juta kepada UMK yang tergabung dalam marketplace sekaligus untuk mendorong bertumbuhnya UMKM di Indonesia. (K2)